



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKAMTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 853802

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** 651.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/96 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/36 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 244 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 51.000.000
4. Tanah Seluas 664 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 497 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** 169.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA A1F02N36M1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N37MI A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000



4. MOBIL, DAIHATSU MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000
5. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 172.587.111

F. HARTA LAINNYA Rp. 64.000.000

Sub Total Rp. 1.084.587.111

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.084.587.111

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.